

Sistem Politik dan Demokrasi dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa (Hukum Tua) di Desa Lompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan

Diana Nadeak¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606001@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 14, 2025

Accepted March 25, 2025

Published May 30, 2025

Keywords:

Demokrasi Lokal,
 Pemilihan Kepala Desa,
 Seleksi Bertingkat,
 Modal Sosial,
 Legitimasi Religius



Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sistem politik dan demokrasi dalam musyawarah pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan fokus pada mekanisme seleksi bertingkat yang menggabungkan nilai-nilai kultural dengan prosedur demokratis modern. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci: seorang pemuda warga asli, seorang pendatang yang telah terintegrasi, dan seorang mantan kepala desa. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: pertama, absennya praktik money politics dalam pemilihan yang menunjukkan efektivitas sistem seleksi berbasis integritas dan modal sosial; kedua, inklusivitas politik yang memungkinkan pendatang berpartisipasi setelah menunjukkan integrasi sosial dan komitmen jangka panjang; ketiga, legitimasi kepemimpinan dibangun berdasarkan kepercayaan komunal melalui proses seleksi demokratis tanpa nepotisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model demokrasi lokal di Desa Lompad mencerminkan sintesis unik antara deliberasi elit dengan partisipasi masyarakat yang mengintegrasikan modal sosial, simbolik-religius, dan prosedur formal demokratis.

Abstract

This study aims to explore the political and democratic systems in the deliberations for the election of the Elder Law in Lompad Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency, with a focus on the multilevel selection mechanism that combines cultural values with modern democratic procedures. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through observation and in-depth interviews with three key informants: a young indigenous person, an integrated migrant, and a former village head. The results reveal three main findings: first, the absence of money politics practices in the election, which demonstrates the effectiveness of the selection system based on integrity and social capital; second, political inclusiveness that allows migrants to participate after demonstrating social integration and long-term commitment; third, leadership legitimacy is built on communal trust through a democratic selection process without nepotism. This study concludes that the local democratic model in Lompad Village reflects a unique synthesis between elite deliberation and community participation that integrates social, symbolic-religious, and formal democratic procedures.

Keywords: Local Democracy, Village Head Election, Multilevel Selection, Social Capital, Religious Legitimacy

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat telah

menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk pada level paling bawah yaitu desa. Menurut Dahl (2001), demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Dalam konteks Indonesia, demokrasi lokal dipraktikkan melalui pemilihan kepala desa yang mengintegrasikan nilai-nilai modern dengan kearifan lokal (Antlöv, 2003). Pemilihan kepala desa merupakan manifestasi demokrasi deliberatif di tingkat grass-root yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara. Hanif (2016) menegaskan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia menunjukkan variasi yang sangat beragam, dimana setiap daerah memiliki mekanisme dan prosedur yang disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat. Praktik demokrasi di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berakar pada tradisi masyarakat.

Desa Lompad di Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan representasi unik dari pelaksanaan demokrasi lokal yang menggabungkan sistem nilai kultural dengan mekanisme politik modern. Sebagai desa yang memiliki sistem kultural kuat dan ikatan kekeluargaan yang erat, Desa Lompad mempertahankan tradisi musyawarah dalam pemilihan Hukum Tua atau kepala desa yang berbeda dengan mekanisme pemilihan langsung pada umumnya. Widjaja (2003) menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional Indonesia, pemilihan pemimpin seringkali melalui proses seleksi bertingkat yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan perangkat desa sebagai penyaring kandidat berdasarkan kriteria tertentu yang dihargai oleh komunitas. Mekanisme pemilihan di Desa Lompad melibatkan perangkat desa yang memilih minimal lima orang kandidat dari setiap jaga atau lingkungan, dimana proses seleksi ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti integritas, pengalaman kepemimpinan dalam organisasi keagamaan, dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Namun, Aspinall dan Berenschot (2019) mengingatkan bahwa praktik demokrasi lokal di Indonesia juga rentan terhadap politik uang, klientelisme, dan nepotisme yang dapat menggerus kualitas demokrasi substantif meskipun prosedur formal tetap dijalankan.

Fenomena politik dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi, agama, dan politik dalam konteks demokrasi lokal Indonesia. Nordholt dan van Klinken (2007) mengungkapkan bahwa desentralisasi politik di Indonesia telah membuka ruang bagi munculnya berbagai praktik politik lokal yang kadang mengaburkan batas antara partisipasi demokratis dengan patronase politik. Dalam kasus Desa Lompad, kriteria pemilihan kandidat yang mencakup pertimbangan politik (seperti potensi money politics), ikatan kekeluargaan, dan pengalaman sebagai penatua gereja menunjukkan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Sutiyo dan Maharjan (2017) mengemukakan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia seringkali merupakan arena kontestasi dimana modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik saling berkompetisi untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Keunikan sistem pemilihan di Desa Lompad terletak pada tahapan pra-seleksi oleh perangkat desa yang berfungsi sebagai filter untuk membatasi jumlah kandidat berdasarkan penilaian yang melibatkan dimensi politik, sosial, dan religius, sehingga menghadirkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif versus demokrasi elitis.

Penelitian tentang pemilihan kepala desa di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para sarjana dengan fokus yang beragam. Vel dan Bedner (2015) melakukan kajian komprehensif tentang desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 mempengaruhi dinamika politik di tingkat

desa. Penelitian mereka menemukan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan otonomi lebih besar kepada desa, praktik politik yang terjadi masih sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan lokal yang telah ada sebelumnya, termasuk dominasi elit desa, patronase politik, dan pengaruh pemerintah supradesa. Mereka juga mengidentifikasi bahwa pemilihan kepala desa seringkali menjadi arena kontestasi yang melibatkan mobilisasi sumber daya ekonomi dan jaringan sosial, dimana kandidat yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya cenderung memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Vel dan Bedner menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tidak selalu mencerminkan preferensi yang bebas dan otonom, tetapi seringkali dipengaruhi oleh berbagai bentuk tekanan sosial dan ekonomi yang membatasi pilihan rasional pemilih.

Aspinall dan Sukmajati (2016) dalam penelitian mereka tentang politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena money politics di tingkat lokal. Mereka menemukan bahwa praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih telah menjadi strategi kampanye yang umum dalam berbagai jenis pemilihan, termasuk pemilihan kepala desa, meskipun praktik ini secara formal dilarang oleh undang-undang. Penelitian mereka menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membeli suara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun dan memelihara hubungan patronase antara calon pemimpin dengan konstituen mereka. Aspinall dan Sukmajati mengungkapkan bahwa dalam konteks masyarakat dengan ikatan kekeluargaan dan komunal yang kuat, pemberian uang atau barang seringkali tidak dipersepsikan sebagai penyuapan, melainkan sebagai bentuk reciprocity atau pertukaran timbal balik yang merupakan bagian dari etika sosial. Temuan ini relevan untuk memahami dinamika politik dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad, dimana aspek sogokan atau money politics disebutkan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses seleksi kandidat oleh perangkat desa, yang menunjukkan adanya kesadaran tentang praktik ini sebagai bagian integral dari kompetisi politik lokal.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang pemilihan kepala desa dan demokrasi lokal di Indonesia, terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian tentang pemilihan kepala desa berfokus pada mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat, sementara sistem seleksi bertingkat atau pra-seleksi kandidat oleh institusi desa seperti yang dipraktikkan di Desa Lompad belum mendapat perhatian yang memadai. Studi-studi yang ada cenderung menganalisis pemilihan kepala desa sebagai proses one-person-one-vote tanpa mengeksplorasi variasi mekanisme seleksi yang mungkin melibatkan tahapan penyaringan oleh elit desa atau perangkat desa sebelum kandidat diajukan kepada masyarakat luas. Padahal, sistem seleksi bertingkat ini memiliki implikasi penting terhadap kualitas demokrasi, representasi politik, dan akuntabilitas kepemimpinan desa. Lebih jauh lagi, interaksi antara faktor politik (termasuk money politics), ikatan kekeluargaan, dan legitimasi religius dalam proses pra-seleksi kandidat merupakan fenomena kompleks yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana berbagai bentuk modal ini saling berkompetisi atau berkolaborasi dalam membentuk struktur peluang politik di tingkat desa.

Kedua, penelitian tentang peran institusi keagamaan, khususnya gereja, dalam politik lokal di wilayah Indonesia Timur yang mayoritas Kristen masih sangat terbatas. Sebagian besar studi tentang agama dan politik di Indonesia berfokus pada konteks Islam atau pada konflik antar-agama, sementara peran gereja sebagai institusi yang memberikan legitimasi sosial dan politik kepada calon pemimpin desa belum dieksplorasi secara komprehensif. Dalam konteks Desa Lompad di Minahasa Selatan, pengalaman sebagai penatua gereja disebutkan sebagai salah satu kriteria yang memberikan kepercayaan dari warga desa terhadap kandidat Hukum Tua. Fenomena ini menunjukkan bagaimana modal simbolik yang berasal dari institusi keagamaan dapat ditransformasikan menjadi modal politik dalam arena pemilihan kepala desa. Namun,

mekanisme konversi modal simbolik-religius menjadi legitimasi politik, serta bagaimana hal ini berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti ikatan kekeluargaan dan money politics, belum mendapat perhatian yang cukup dalam literatur akademik. Penelitian yang mengisi kesenjangan ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik lokal di wilayah-wilayah dengan karakteristik sosio-kultural dan religius yang spesifik.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam tentang sistem seleksi bertingkat dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad yang menggabungkan mekanisme deliberasi elit desa dengan pertimbangan multi-dimensional meliputi aspek politik, kekeluargaan, dan religius. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menganalisis pemilihan kepala desa sebagai proses linear dari pencalonan hingga pemungutan suara, penelitian ini akan mengungkap kompleksitas tahapan pra-seleksi yang dilakukan oleh perangkat desa sebagai gatekeeper politik yang menentukan siapa saja yang berhak berkompetisi untuk posisi kepemimpinan desa. Analisis tentang bagaimana perangkat desa menilai kandidat berdasarkan potensi money politics, ikatan kekeluargaan, dan pengalaman kepemimpinan religius akan memberikan pemahaman baru tentang kriteria legitimasi politik dalam konteks demokrasi lokal Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana sistem kultural yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang erat di Desa Lompad membentuk norma-norma politik informal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan demokratis, sehingga memberikan perspektif alternatif terhadap pemahaman konvensional tentang demokrasi yang seringkali didasarkan pada model liberal-prosedural.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memahami hubungan antara modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik-religius dalam membentuk struktur peluang politik di tingkat desa. Dengan menggunakan kerangka analisis yang mengintegrasikan teori demokrasi deliberatif, teori modal sosial, dan teori institusionalisme, penelitian ini akan menganalisis bagaimana berbagai bentuk modal tersebut tidak hanya berkompetisi tetapi juga saling melengkapi dalam proses legitimasi kandidat kepemimpinan desa. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji peran gereja sebagai institusi yang memberikan modal simbolik kepada individu, dan bagaimana modal simbolik ini dapat dikonversi menjadi kepercayaan politik dalam konteks masyarakat dengan ikatan komunal yang kuat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik tentang variasi praktik demokrasi lokal di Indonesia dan memberikan pemahaman yang lebih nuanced tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan agama saling berinteraksi dalam membentuk tata kelola pemerintahan desa di era desentralisasi.

Realitas pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad mencerminkan kompleksitas demokrasi lokal yang tidak dapat dipahami hanya melalui kerangka prosedur formal pemilihan, tetapi harus dilihat sebagai proses sosial-politik yang tertanam dalam struktur kultural dan relasional masyarakat. Sistem pemilihan yang melibatkan perangkat desa dalam menyeleksi minimal lima kandidat dari setiap jaga atau lingkungan menunjukkan adanya mekanisme deliberasi elit yang berfungsi sebagai tahapan penyaringan awal sebelum kandidat diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dalam proses ini, perangkat desa tidak hanya bertindak sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan kandidat berdasarkan berbagai kriteria yang mencerminkan nilai-nilai dan prioritas komunitas lokal. Kriteria-kriteria ini mencakup pertimbangan tentang integritas kandidat yang dinilai dari kemungkinan mereka terlibat dalam praktik money politics, kedekatan kekeluargaan yang mencerminkan tingkat kepercayaan dan keterikatan sosial, serta pengalaman kepemimpinan dalam institusi keagamaan khususnya sebagai penatua gereja yang menunjukkan kualitas moral dan kemampuan kepemimpinan yang telah teruji dalam konteks komunal.

Fenomena money politics atau pemberian sogokan dalam konteks pemilihan di Desa Lompad menjadi salah satu indikator penting yang dipertimbangkan oleh perangkat desa, bukan dalam pengertian untuk mendorong praktik tersebut, tetapi justru sebagai upaya untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki integritas dan tidak mengandalkan kekuatan ekonomi semata untuk meraih dukungan. Di sisi lain, ikatan kekeluargaan yang kuat di Desa Lompad menciptakan jaringan kepercayaan yang menjadi modal sosial penting dalam politik lokal, dimana kedekatan genealogis atau relasional dengan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kandidat karena adanya rasa kebersamaan dan tanggung jawab moral yang lebih besar. Pengalaman sebagai penatua gereja menambah dimensi legitimasi religius-moral yang sangat dihargai dalam masyarakat Minahasa yang memiliki tradisi Kristen yang kuat, dimana kepemimpinan religius dipandang sebagai bukti kemampuan individu dalam membimbing komunitas dengan integritas dan kebijaksanaan. Kombinasi ketiga faktor ini—pertimbangan politik tentang money politics, ikatan kekeluargaan, dan legitimasi religius—menciptakan sistem penilaian kandidat yang unik dan kompleks, yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan realitas politik kontemporer, sekaligus menghadirkan tantangan dalam memastikan bahwa proses pemilihan tetap demokratis, inklusif, dan akuntabel kepada kepentingan seluruh warga desa, bukan hanya kepada elit atau kelompok tertentu.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi sistem politik dan demokrasi dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif partisipan yang terlibat langsung dalam konteks penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dinamika politik lokal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, khususnya dalam mengungkap nilai-nilai kultural, norma sosial, dan praktik politik informal yang mempengaruhi proses pemilihan kepemimpinan desa. Denzin dan Lincoln (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif sangat efektif dalam menganalisis fenomena yang memerlukan pemahaman kontekstual dan interpretasi mendalam terhadap makna yang dikonstruksikan oleh para aktor sosial dalam setting alamiah mereka.

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika sosial-politik di Desa Lompad, termasuk interaksi antar warga, praktik musyawarah, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam konteks pemilihan Hukum Tua. Spradley (2016) menjelaskan bahwa observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data autentik tentang perilaku, interaksi, dan praktik sosial yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara formal. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan fokus pada sistem politik yang berlaku di Desa Lompad, khususnya untuk mengidentifikasi apakah terdapat praktik nepotisme atau "orang dalam" dalam proses pemilihan kepala desa, serta bagaimana faktor genealogis dan kekeluargaan mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Observasi juga diarahkan untuk memahami konteks sosio-kultural yang membentuk norma-norma politik informal, seperti sistem jaga atau lingkungan, ikatan komunal, dan peran institusi adat maupun keagamaan dalam legitimasi kepemimpinan.

Wawancara mendalam dilakukan dengan tiga informan yang dipilih secara purposive untuk merepresentasikan perspektif berbeda dalam masyarakat Desa Lompad: seorang pemuda bernama VNP yang merepresentasikan generasi muda dan warga asli, seorang pendatang yang telah menjadi bagian dari komunitas bernama NR yang berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris di SD Inpres Lompad, dan seorang mantan kepala desa bernama HKP yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pemilihan kepemimpinan desa. Menurut Patton (2015), pemilihan informan secara purposive dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan

informasi yang kaya dan mendalam dari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi sesuai dengan dinamika percakapan, sambil tetap mempertahankan fokus pada tema-tema utama penelitian seperti praktik money politics, kriteria pemilihan kandidat, mekanisme seleksi, dan partisipasi politik masyarakat. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari narasi informan, serta untuk memahami bagaimana sistem politik dan demokrasi dipraktikkan dalam konteks spesifik Desa Lompad (Braun & Clarke, 2006).

C. Results and Discussion

1. Integritas Politik dan Absennya Praktik *Money Politics* dalam Pemilihan Hukum Tua

Temuan pertama yang signifikan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik money politics atau pemberian sogokan kepada pemilih tidak terjadi secara eksplisit dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad, sebagaimana dikonfirmasi oleh informan kunci dari kalangan pemuda. VNP secara tegas menyatakan bahwa ia belum pernah menerima sogokan dari siapapun yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, yang menunjukkan bahwa proses pemilihan di desa ini tidak didominasi oleh mobilisasi sumber daya ekonomi untuk membeli suara pemilih. Temuan ini kontras dengan literatur tentang politik uang di Indonesia yang menunjukkan bahwa praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih telah menjadi fenomena umum dalam berbagai jenis pemilihan lokal (Aspinall & Sukmajati, 2016). Absennya money politics dalam kasus Desa Lompad dapat dijelaskan melalui beberapa faktor: pertama, sistem pra-seleksi kandidat oleh perangkat desa yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas untuk menyaring kandidat yang berintegritas; kedua, struktur kultural dan ikatan kekeluargaan yang kuat menciptakan sistem kepercayaan berbasis relasi sosial jangka panjang yang tidak dapat dibeli dengan uang; dan ketiga, peran nilai-nilai religius yang menjunjung tinggi integritas moral dalam kepemimpinan.

Gambar 1. Wawancara dengan VNP



Sumber: Data Primer

Absennya praktik money politics di Desa Lompad menunjukkan bahwa sistem seleksi bertingkat yang melibatkan perangkat desa sebagai gatekeeper politik telah berfungsi secara efektif dalam memastikan bahwa kandidat yang diajukan memiliki legitimasi berdasarkan modal sosial dan modal simbolik-religius, bukan semata-mata modal ekonomi. Hal ini sejalan dengan argumen Bourdieu (1986) tentang berbagai bentuk modal yang dapat dikonversi satu sama lain dalam arena politik, namun dalam konteks Desa Lompad, konversi modal ekonomi menjadi legitimasi politik tampaknya dibatasi oleh norma-norma komunal yang mengutamakan kepercayaan relasional dan integritas moral. Sistem nilai kultural yang kuat di Desa Lompad menciptakan mekanisme sanksi sosial informal terhadap kandidat yang mencoba menggunakan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi pemilih, karena tindakan tersebut dapat merusak reputasi jangka panjang dan kepercayaan komunal yang menjadi fondasi kepemimpinan desa. Lebih lanjut, peran perangkat desa dalam melakukan penilaian awal terhadap kandidat berdasarkan potensi keterlibatan mereka dalam money politics menunjukkan adanya kesadaran kritis dari elit desa tentang bahaya praktik tersebut terhadap kualitas demokrasi lokal.

Temuan tentang integritas politik di Desa Lompad juga mengindikasikan bahwa masyarakat telah mengembangkan mekanisme resistensi terhadap komodifikasi suara pemilih melalui penguatan ikatan komunal dan nilai-nilai bersama yang menekankan tanggung jawab kolektif dalam memilih pemimpin. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial yang tinggi dalam suatu komunitas dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap praktik-praktik politik yang eksploitatif karena adanya norma timbal balik dan kepercayaan yang terbangun melalui interaksi sosial jangka panjang. Dalam konteks Desa Lompad, ikatan kekeluargaan dan sistem jaga atau lingkungan menciptakan struktur solidaritas horizontal yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap perilaku kandidat maupun pemilih. Absennya money politics juga dapat dipahami sebagai indikator bahwa proses demokratisasi di tingkat desa tidak hanya diukur dari prosedur formal pemilihan, tetapi juga dari kualitas substansial demokrasi yang tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk memilih berdasarkan pertimbangan rasional tentang kapasitas dan integritas kandidat, bukan semata-mata insentif material jangka pendek.

2. Inklusivitas Politik dan Integrasi Pendatang dalam Sistem Demokrasi Desa

Gambar 2. Wawancara dengan NR



Sumber: Data Primer

Temuan kedua yang menarik dari penelitian ini adalah praktik inklusivitas politik di Desa Lompad yang memungkinkan pendatang untuk berpartisipasi dalam pemilihan Hukum Tua setelah memenuhi kriteria tertentu, khususnya durasi tinggal dan integrasi sosial dengan komunitas lokal. NR, seorang guru Bahasa Inggris yang merupakan pendatang di desa ini, mengungkapkan bahwa meskipun pada awal kedatangannya ia belum diperbolehkan untuk ikut memilih, namun setelah empat tahun tinggal dan berkontribusi di Desa Lompad, ia telah diterima sebagai bagian dari komunitas dan diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Proses integrasi ini diperkuat dengan pembuatan surat domisili yang menunjukkan status kependudukan formal di desa tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem politik di Desa Lompad tidak sepenuhnya eksklusif berdasarkan asal-usul genealogis, melainkan membuka ruang bagi individu yang telah menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap komunitas untuk mendapatkan hak politik penuh.

Praktik inklusivitas terhadap pendatang di Desa Lompad mencerminkan evolusi pemahaman tentang keanggotaan politik yang tidak hanya didasarkan pada kriteria primordial seperti kelahiran atau keturunan, tetapi juga pada kriteria achievement berupa kontribusi sosial dan integrasi kultural. Anderson (1991) dalam konsepnya tentang "imagined communities" menjelaskan bahwa keanggotaan dalam suatu komunitas politik dapat dibentuk melalui proses imajinasi kolektif yang mengakui individu sebagai bagian dari "kita" berdasarkan berbagai penanda identitas, termasuk tempat tinggal, kontribusi sosial, dan partisipasi dalam kehidupan komunal. Dalam kasus NR, perannya sebagai guru yang berkontribusi terhadap pendidikan anak-anak desa dan keputusannya untuk membuat domisili formal telah menjadi bukti komitmen terhadap komunitas, sehingga masyarakat Desa Lompad mengakuinya sebagai warga yang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik penting seperti pemilihan kepala desa. Periode empat tahun yang diperlukan untuk mendapatkan hak memilih menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan dimensi waktu sebagai indikator keseriusan dan keterikatan individu terhadap nasib komunitas.

Inklusivitas politik di Desa Lompad juga mengindikasikan fleksibilitas sistem demokrasi lokal dalam menyeimbangkan antara proteksi kepentingan warga asli dengan keterbukaan terhadap kontribusi pendatang yang dapat memperkaya dinamika sosial-politik desa. Vel dan Bedner (2015) mengemukakan bahwa salah satu tantangan dalam demokrasi lokal di Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara mempertahankan otonomi komunitas lokal dengan prinsip inklusivitas yang menjadi fondasi demokrasi modern. Sistem yang diterapkan di Desa Lompad—yang memberikan hak politik kepada pendatang setelah mereka menunjukkan integrasi sosial dan komitmen jangka panjang—menunjukkan bahwa komunitas ini telah mengembangkan mekanisme seleksi yang memastikan bahwa partisipasi politik hanya diberikan kepada individu yang memiliki stake dalam nasib desa dan memahami konteks sosio-kultural setempat. Praktik ini juga mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif dimana keanggotaan politik tidak hanya bersifat formal-legal tetapi juga substansial, dalam arti bahwa individu yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif adalah mereka yang benar-benar terikat dengan konsekuensi keputusan tersebut dan memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai serta kepentingan komunitas.

3. Legitimasi Berbasis Kepercayaan Komunal dan Proses Seleksi Demokratis

Temuan ketiga yang krusial adalah bahwa legitimasi kepemimpinan di Desa Lompad dibangun berdasarkan kepercayaan langsung dari masyarakat melalui proses seleksi yang melibatkan prosedur bertingkat, sebagaimana dialami oleh HKP, mantan kepala desa yang

terpilih tanpa mengandalkan praktik nepotisme atau "orang dalam". Pernyataan informan bahwa ia "dipilih dan dipercayai langsung oleh masyarakat desa lompad" dan bahkan "kaget" dengan hasil pemilihan menunjukkan bahwa proses tersebut tidak dimanipulasi oleh jaringan informal atau kolusi elit desa, melainkan merupakan hasil dari penilaian objektif masyarakat terhadap kapasitas dan integritasnya. Pengalaman HKP juga mengungkapkan bahwa sistem seleksi bertingkat yang melibatkan "beberapa prosedur" telah berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih adalah mereka yang benar-benar memiliki dukungan luas dari masyarakat, bukan hanya dari kelompok kepentingan tertentu.

Gambar 3. Wawancara dengan HKP



Sumber: Data Primer

Legitimasi berbasis kepercayaan komunal ini mencerminkan prinsip demokrasi substantif dimana kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari prosedur formal pemilihan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan dukungan yang diterima pemimpin dari konstituennya. Weber (1978) dalam tipologi otoritas tradisional, karismatik, dan legal-rasional menjelaskan bahwa legitimasi kepemimpinan dapat bersumber dari berbagai basis, dan dalam konteks Desa Lompad, legitimasi tampaknya merupakan kombinasi dari otoritas tradisional yang berakar pada sistem kultural dan otoritas legal-rasional yang diperoleh melalui prosedur pemilihan demokratis. Kejutan yang dialami HKP setelah terpilih mengindikasikan bahwa ia tidak melakukan kampanye agresif atau mobilisasi sumber daya ekonomi untuk meraih dukungan, melainkan reputasi dan integritas yang telah dibangun melalui keterlibatan dalam kehidupan komunal—termasuk kemungkinan perannya dalam institusi keagamaan sebagai penatua gereja—yang menjadi modal sosial dan simbolik untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep "earned legitimacy" dimana kepemimpinan yang sah adalah yang diperoleh melalui demonstrasi konsisten terhadap nilai-nilai dan kemampuan yang dihargai oleh komunitas.

Proses seleksi bertingkat yang dijalani oleh HKP menunjukkan bahwa sistem pemilihan di Desa Lompad dirancang untuk menyaring kandidat berdasarkan kriteria multi-dimensional yang mencakup aspek integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Hanif (2016) menjelaskan bahwa variasi mekanisme pemilihan kepala desa di Indonesia mencerminkan upaya masyarakat lokal untuk mengadaptasi prinsip-prinsip demokrasi dengan konteks sosio-kultural spesifik, dimana tidak ada satu model tunggal yang dapat diterapkan secara universal. Dalam kasus Desa Lompad, sistem seleksi yang melibatkan perangkat desa sebagai tahapan awal untuk mengidentifikasi kandidat potensial dari setiap jaga atau lingkungan, diikuti dengan musyawarah dan pemilihan oleh masyarakat luas, menciptakan mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki

legitimasi ganda: legitimasi dari elit desa yang menilai kelayakan berdasarkan kriteria spesifik, dan legitimasi dari masyarakat luas yang memberikan mandat melalui pemilihan. Sistem ini menunjukkan sintesis antara demokrasi elitis yang menekankan peran elit dalam seleksi kepemimpinan dengan demokrasi partisipatif yang memberikan kewenangan akhir kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka, sehingga menghasilkan model demokrasi lokal yang unik dan adaptif terhadap karakteristik komunitas.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem politik dan demokrasi dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Lompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan mencerminkan sintesis unik antara nilai-nilai demokrasi modern dengan kearifan lokal yang berakar pada struktur kultural masyarakat. Sistem seleksi bertingkat yang melibatkan perangkat desa sebagai gatekeeper politik telah berfungsi efektif dalam memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki legitimasi berbasis pada modal sosial, modal simbolik-religius, dan integritas moral, bukan semata-mata modal ekonomi melalui praktik money politics. Temuan penelitian menunjukkan absennya praktik pemberian sogokan kepada pemilih, yang mengindikasikan bahwa ikatan kekeluargaan yang kuat dan nilai-nilai religius telah menciptakan mekanisme resistensi komunal terhadap komodifikasi suara pemilih. Inklusivitas politik yang memungkinkan pendatang berpartisipasi setelah menunjukkan integrasi sosial dan komitmen jangka panjang terhadap komunitas mendemonstrasikan fleksibilitas sistem demokrasi lokal dalam menyeimbangkan proteksi kepentingan warga asli dengan keterbukaan terhadap kontribusi individu yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan desa. Proses pemilihan yang menghasilkan legitimasi berbasis kepercayaan komunal, sebagaimana dialami oleh mantan kepala desa yang terpilih tanpa mengandalkan nepotisme, membuktikan bahwa mekanisme demokratis di Desa Lompad telah berhasil mengintegrasikan prosedur formal dengan penilaian substansial terhadap kapasitas dan integritas kandidat.

Model demokrasi lokal di Desa Lompad memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang variasi praktik demokratisasi di Indonesia, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosio-kultural dan religius yang spesifik. Sistem seleksi bertingkat yang menggabungkan deliberasi elit desa dengan partisipasi masyarakat luas menciptakan mekanisme checks and balances yang memastikan akuntabilitas dan representativitas kepemimpinan desa. Peran institusi keagamaan, khususnya gereja, dalam memberikan legitimasi simbolik kepada kandidat melalui pengalaman sebagai penatua menunjukkan bagaimana modal religius dapat ditransformasikan menjadi kepercayaan politik dalam konteks masyarakat dengan tradisi Kristen yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut tentang mekanisme konversi berbagai bentuk modal dalam politik lokal, serta evaluasi kritis terhadap sistem seleksi bertingkat untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap inklusif, transparan, dan akuntabel kepada kepentingan seluruh warga desa, bukan hanya kepada elit atau kelompok tertentu. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan model demokrasi lokal yang kontekstual dan adaptif terhadap keragaman sosio-kultural Indonesia, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental demokrasi seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang berkeadilan.

E. Daftar Pustaka

- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Antlöv, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (2001). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Hanif, H. (2016). Pemilihan Kepala Desa dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1), 17-31.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Long Grove: Waveland Press.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.